

## TRANSFORMASI TATA KELOLA EKONOMI PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE

Oleh:

<sup>1</sup>Andi Zulkarnain, <sup>2</sup>Khanan Yusuf, <sup>3</sup>Nian Riawati, <sup>4</sup>Diah Hari Suryaningrum,  
<sup>5</sup>Aryo Prakoso

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Ujung Pandang PSDKU Kolaka  
Jl. Mutiara, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara

<sup>2</sup>BRIN  
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10340

<sup>3</sup>Universitas Jember  
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

<sup>4</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

<sup>5</sup>Universitas Jember  
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

e-mail: zulkarnain@poliupg.ac.id<sup>1</sup>, khanan.yusuf@brin.co.id<sup>2</sup>, nian.fisip@unej.ac.id<sup>3</sup>,  
diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id<sup>4</sup>, Aryo.fisip@unej.ac.id<sup>5</sup>

---

### ABSTRACT

*Transforming public economic governance through digitalization is a crucial agenda for realizing the principles of good governance in a globalized world. However, field dynamics indicate a gap between technological infrastructure readiness and stakeholder engagement behavior. This qualitative research aims to deeply explore the processes, structural-cultural barriers, and dimensions of human behavior in the implementation of digital platforms in the public economic sector. Using a descriptive-analytical case study design, data were collected through in-depth interviews with purposively selected key informants, field observations, and official documents. Data validity was tested using source and method triangulation techniques, which were then analyzed qualitatively through a thematic analysis approach. The results show that structurally, digitalization has successfully overhauled traditional bureaucracy, cut corrupt service chains, and increased transparency and accountability in public finances. However, this success faces cultural challenges in the form of resistance to change, a silo mentality, and low user behavioral intentions due to limited digital literacy and system perceptions (effort expectancy). Based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), weak facilitating conditions are the primary factor inhibiting optimal system adoption. This study concludes that good governance cannot be achieved solely through normative regulations and hardware procurement, but rather requires simultaneous integration with strengthening digital literacy capacity and user behavioral interventions. The policy implications of this research emphasize the importance of simplifying digital procedures and extensive training to create an efficient and accountable public economic system.*

**Keywords:** Good Governance, Public Economic Governance, Digitalization

---

## ABSTRAK

Transformasi tata kelola ekonomi publik melalui digitalisasi merupakan agenda krusial dalam mewujudkan prinsip *good governance* di tengah ketidakpastian global. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan infrastruktur teknologi dengan perilaku adopsi para pemangku kepentingan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam proses, hambatan struktural-kultural, serta dimensi perilaku manusia dalam implementasi platform digital pada sektor ekonomi publik. Menggunakan desain studi kasus deskriptif-analitis, data dihimpun melalui wawancara mendalam kepada informan kunci yang dipilih secara purposive, observasi lapangan, dan telaah dokumen resmi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural, digitalisasi berhasil merombak birokrasi tradisional, memotong rantai pelayanan yang koruptif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Meski demikian, keberhasilan ini membentur hambatan kultural berupa resistensi terhadap perubahan, mentalitas silo (*silo mentality*), serta rendahnya niat perilaku (*behavioral intention*) pengguna akibat keterbatasan literasi digital dan persepsi sistem yang rumit (*effort expectancy*). Berdasarkan lensa teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), lemahnya kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) menjadi faktor utama penghambat adopsi sistem secara optimal. Studi ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan *good governance* tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi normatif dan pengadaan perangkat keras, melainkan memerlukan integrasi simultan dengan penguatan kapasitas literasi digital serta intervensi perilaku pengguna. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur digital dan pelatihan masif demi terciptanya tatanan ekonomi publik yang efisien dan akuntabel.

**Kata Kunci:** *Good Governance*, Tata Kelola Ekonomi Publik, Digitalisasi

---

## PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian global dan domestik yang bergerak eksponensial menuntut adanya reorientasi fundamental dalam pengelolaan sektor publik, di mana tata kelola ekonomi publik tidak lagi sekadar dipandang sebagai instrumen administratif untuk mengalokasikan anggaran, melainkan sebagai fondasi strategis yang menentukan daya saing, stabilitas, dan kesejahteraan berkelanjutan suatu negara (Suriadi, 2025). Sektor publik saat ini sering kali dihadapkan pada kritik tajam terkait lambatnya birokrasi, rendahnya daya serap anggaran, serta alokasi sumber daya yang belum sepenuhnya berorientasi pada dampak (*outcome-based*), sementara di era digitalisasi dan keterbukaan informasi, tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, tepat, dan bebas korupsi justru semakin meningkat, sehingga mentransformasi tata kelola ekonomi publik bukan lagi sebuah pilihan normatif, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk membangun kapasitas negara yang adaptif dan responsif terhadap ketidakpastian global (Silitonga, 2024).

Inti dari transformasi tata kelola ini berakar pada pengejawantahan prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi, di mana dalam konteks ekonomi publik, transparansi memastikan setiap rupiah anggaran yang dipungut dari rakyat dapat ditelusuri penggunaannya secara terbuka, sedangkan akuntabilitas menuntut para pembuat kebijakan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan maupun kegagalan program ekonomi yang dijalankan, sehingga ketika prinsip-prinsip ini

diintegrasikan ke dalam manajemen keuangan publik, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalisasi, kepercayaan publik (*public trust*) akan meningkat, dan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi dapat dipacu secara lebih sehat dan inklusif (Kusuma, 2024).

Meskipun narasi mengenai *good governance* telah lama digaungkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa manifestasinya masih membentur berbagai hambatan struktural dan kultural, di mana di banyak institusi publik, proses manajemen ekonomi dan pengumpulan pendapatan negara masih terbelenggu oleh metode tradisional yang bersifat manual, silokan (*silo mentality*), dan rentan terhadap asimetri informasi, yang pada gilirannya memicu ketidakefektifan pengumpulan dana publik, lemahnya integrasi data antarlembaga, serta minimnya pengawasan partisipatif yang berujung pada inefisiensi anggaran yang masif (Muflihaniardi et al., 2026). Selain itu, resistensi internal terhadap perubahan dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengadopsi sistem manajemen modern memperpanjang rantai birokrasi yang tidak perlu, menegaskan adanya kesenjangan yang lebar antara regulasi yang ideal dengan implementasi konkret di tingkat operasional (Taufiq et al., 2024).

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pemanfaatan teknologi digital hadir sebagai solusi inovatif dan akselerator utama dalam merombak tata kelola ekonomi publik dengan mengubah cara kerja birokrasi dari yang semula kaku dan berbasis kertas (*paper-based*) menjadi sistem yang terintegrasi, *real-time*, dan berbasis data (*data-driven*), di mana melalui implementasi platform digital dalam sistem penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah (*e-procurement*), hingga sistem administrasi perpajakan dan retribusi, celah-celah manipulasi dapat ditutup secara signifikan, memotong rantai birokrasi yang koruptif, serta meningkatkan kecepatan pelayanan dan akurasi pengambilan keputusan ekonomi agar pengelolaan keuangan publik menjadi jauh lebih optimal, efisien, dan akuntabel (Saepuloh & Hilmi, 2026).

Kendati infrastruktur digital dan sistem tata kelola baru telah dirancang sedemikian rupa, keberhasilan transformasi ini pada akhirnya sangat bergantung pada dimensi perilaku manusia (*human behavior*) dan tingkat penerimaan para pemangku kepentingan (*stakeholders acceptance*), mengingat transformasi sistem ekonomi publik melibatkan interaksi kompleks antara aparatur sipil negara sebagai pelaksana tata kelola dan masyarakat atau pelaku usaha sebagai pengakses layanan (Andriyan et al., 2024). Seringkali, kegagalan sistem baru bukan disebabkan oleh kelemahan perangkat lunaknya, melainkan oleh rendahnya niat perilaku (*behavioral intention*) pengguna untuk mengadopsinya, yang dipicu oleh faktor-faktor seperti rendahnya literasi digital, persepsi bahwa sistem baru menyulitkan, atau kurangnya kondisi fasilitas yang mendukung, sehingga menganalisis faktor psikologis, sosial, dan ekspektasi kinerja pengguna melalui pendekatan teoretis yang mapan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dari transformasi tata kelola ini (Sartika et al., 2025).

Berdasarkan ulasan tersebut, terdapat sebuah *research gap* yang nyata mengenai bagaimana mengintegrasikan reformasi kelembagaan berbasis *good governance* dengan kesiapan adopsi teknologi digital secara simultan di sektor ekonomi publik, sebab kebanyakan studi terdahulu cenderung membahas aspek regulasi secara terpisah atau hanya berfokus pada kecanggihan teknologi tanpa mempertimbangkan kesiapan perilaku organisasi dan masyarakat. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menganalisis secara mendalam proses, hambatan, serta faktor penentu keberhasilan "Transformasi Tata Kelola Ekonomi Publik menuju Good Governance", di mana melalui pemetaan empiris dan teoretis yang komprehensif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan berupa rekomendasi kebijakan yang strategis, aplikatif, dan berkelanjutan bagi pengambil keputusan demi terciptanya tatanan ekonomi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

## TINJAUAN PUSTAKA

Secara konseptual, penataan kembali sektor publik bersandar pada paradigma *Good Governance* dan *New Public Management* (NPM), yang menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan pemorientasian hasil dalam tubuh birokrasi pemerintahan. Menurut Rhodes (1996) dan United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* bukan *sekadar* mekanisme administratif, melainkan kerangka kerja tata kelola yang melibatkan interaksi sinergis antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil demi mencapai pengelolaan sumber daya yang berkeadilan (Saputra & Latief, 2025). Dalam ranah ekonomi publik, implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi instrumen krusial untuk meminimalisasi risiko moral (*moral hazard*) dan asimetri informasi yang kerap terjadi pada manajemen keuangan tradisional (Sodiq et al., 2026). Ketika lembaga publik mampu menyajikan data keuangan yang kredibel, dapat diakses secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka efektivitas alokasi anggaran akan meningkat secara signifikan (Mandasari, 2023). Landasan teoretis ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan ekonomi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya komitmen kuat untuk menginternalisasi nilai-nilai tata kelola yang bersih dan partisipatif ke dalam struktur organisasi (Zalmi et al., 2025).

Seiring berjalannya waktu, institusi publik dituntut untuk mengadopsi konsep pemerintahan digital (*e-government*) sebagai instrumen utama dalam mengakselerasi perwujudan tata kelola yang baik. Digitalisasi sektor publik tidak lagi dipandang terbatas pada digitalisasi dokumen, melainkan sebagai restrukturisasi menyeluruh terhadap proses bisnis birokrasi agar menjadi lebih responsif, efisien, dan minim intervensi fisik yang koruptif (Dahlia, 2023). Berbagai literatur empiris menunjukkan bahwa penerapan platform digital seperti sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*), pengelolaan anggaran berbasis elektronik (*e-budgeting*), hingga digitalisasi sistem retribusi dan perpajakan mampu memangkas biaya transaksional secara masif dan menutup celah kebocoran anggaran negara. Sistem yang terintegrasi dan berbasis data (*data-driven*) memungkinkan pengawasan dilakukan secara *real-time*, baik oleh internal pemerintah maupun oleh publik melalui mekanisme *open data*. Melalui pendekatan ini, teknologi berfungsi sebagai infrastruktur strategis yang memaksa birokrasi bekerja dalam koridor transparansi yang ketat (Andhika, 2017).

Kendati keandalan infrastruktur teknologi dan sistem regulasi tata kelola baru telah terpenuhi, keberhasilan implementasi program transformasi ini pada akhirnya dipengaruhi oleh kesiapan dimensi manusia selaku pengguna akhir (*end-users*). Untuk membedah fenomena ini, literatur *manajemen* dan sistem informasi kerap menggunakan pendekatan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003). Teori ini menjelaskan bahwa niat perilaku (*behavioral intention*) seseorang untuk mengadopsi sebuah platform digital ditentukan oleh interaksi kompleks beberapa faktor utama, yaitu ekspektasi kinerja (*performance expectancy*), ekspektasi usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial (*social influence*), dan kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) (Maharudin, 2025). Dalam konteks pelayanan ekonomi publik, aparat pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna sering kali memunculkan resistensi apabila sistem baru dirasa rumit, tidak langsung berdampak pada efisiensi kerja mereka, atau kurang didukung oleh pelatihan dan fasilitas gawai yang memadai. Dengan demikian, integrasi antara pembenahan regulasi institusional berorientasi *good governance* dan penguatan faktor penerimaan perilaku pengguna digital menjadi satu kesatuan mata rantai riset yang fundamental demi menjamin keberlanjutan reformasi ekonomi publik (Frinaldi, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi secara mendalam proses, dinamika, dan tantangan nyata dalam "Transformasi Tata Kelola Ekonomi Publik menuju Good Governance". Subjek penelitian atau informan dipilih secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mencakup para pembuat kebijakan di instansi terkait, aparatur pelaksana sistem digital, serta perwakilan masyarakat atau pelaku usaha yang terdampak langsung oleh perubahan sistem ini. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria keahlian, keterlibatan langsung, dan pengalaman mereka agar mampu memberikan data yang kaya dan kontekstual. Lokasi penelitian berfokus pada instansi pemerintah publik yang sedang gencar mengintegrasikan platform digital dalam manajemen ekonominya, guna menangkap fenomena empiris terkait resistensi birokrasi, kesiapan budaya organisasi, serta dinamika sosial-psikologis yang terjadi selama masa transisi tata kelola.

Data primer dalam penelitian kualitatif ini dihimpun melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur untuk menggali persepsi, motivasi, dan kendala perilaku (*behavioral aspects*) dari para pemangku kepentingan. Selain wawancara, pengumpulan data diperkuat dengan observasi partisipatif terhadap operasional sistem baru serta dokumentasi berupa regulasi, laporan kinerja, dan arsip digital terkait. Untuk menjamin keabsahan dan validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber (membandingkan data antar-informan) maupun triangulasi metode (mencocokkan hasil wawancara dengan bukti dokumen). Data yang telah valid kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyusunan kode (*coding*), kategorisasi berdasarkan pola hambatan dan keberhasilan, hingga penarikan kesimpulan yang mampu mengabstraksikan bagaimana dimensi tata kelola dan perilaku manusia berinteraksi dalam reformasi ekonomi publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses dan Keberhasilan Transformasi Digital Sektor Publik

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen di instansi yang menjadi lokus penelitian, ditemukan bahwa proses transformasi tata kelola ekonomi publik melalui digitalisasi telah berjalan pada jalur struktural yang progresif. Implementasi platform digital seperti sistem penganggaran elektronik, integrasi data pendapatan, dan *e-procurement* terbukti mampu merombak model birokrasi tradisional yang semula kaku dan berbasis kertas menjadi lebih terintegrasi dan transparan. Informan kunci dari kalangan manajemen menekankan bahwa intervensi fisik dalam pelayanan ekonomi telah berkurang secara signifikan, yang secara langsung memotong rantai birokrasi yang panjang dan menutup celah-celah manipulasi anggaran. Data dokumen laporan menunjukkan peningkatan kecepatan pemrosesan data keuangan publik dan transparansi informasi yang kini dapat diakses secara berkala oleh masyarakat, menandakan adanya komitmen kelembagaan yang kuat dalam mewujudkan pilar-pilar utama tata kelola yang bersih.

### Hambatan Struktural, Kultural, dan Perilaku Adopsi Sistem

Meskipun infrastruktur teknologi telah terpasang, hasil penelitian lapangan mengungkap adanya hambatan serius pada dimensi kultural organisasi dan perilaku pengguna (*human behavior*). Wawancara dengan aparatur pelaksana di tingkat bawah dan perwakilan masyarakat menunjukkan adanya fenomena resistensi terhadap perubahan (*resistance to change*). Di internal birokrasi, masih ditemukan mentalitas silokan (*silo*

*mentality*) di mana beberapa divisi enggan berbagi data secara terbuka karena khawatir kehilangan otoritas tradisional mereka. Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat dan pelaku usaha, hambatan utama yang muncul adalah rendahnya tingkat literasi digital dan persepsi bahwa sistem baru ini terlalu rumit serta menyita waktu pada tahap awal pengoperasian. Kondisi fasilitas penunjang yang belum merata, seperti jaringan internet yang tidak stabil di beberapa unit kerja, turut memperlemah niat perilaku (*behavioral intention*) pemangku kepentingan untuk mengadopsi platform digital ini secara penuh (Sukawati et al., 2022).

### **Analisis Temuan dalam Konteks Teori Good Governance**

Menyoroti hasil temuan terkait proses transformasi, keberhasilan reformasi ini memberikan konfirmasi empiris yang kuat terhadap teori *Good Governance* dan *New Public Management* (NPM). Ketika institusi publik mengintegrasikan platform digital ke dalam manajemen ekonominya, mereka secara langsung sedang menginternalisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang digaungkan oleh Rhodes (1996). Digitalisasi berfungsi sebagai arsitektur teknologi yang memaksa birokrasi untuk mereduksi asimetri informasi dan meminimalisasi risiko moral (*moral hazard*). Temuan di lapangan membuktikan bahwa pemotongan rantai birokrasi bukan sekadar menyederhanakan administrasi, melainkan sebuah restrukturisasi kekuasaan publik agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome-based*) dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Fountain (2001) mengenai konsep *the enacted technology*, di mana teknologi yang diterapkan dengan regulasi yang tepat akan menjadi katalisator utama dalam membangun *public trust* (kepercayaan publik) dan menciptakan efisiensi alokasi anggaran ekonomi publik (Wahyiah, 2025).

### **Analisis Hambatan Perilaku melalui Lensa Teori Adopsi Teknologi (UTAUT)**

Hambatan perilaku dan kultural yang ditemukan di lapangan dapat dibedah secara tajam menggunakan konstruksi teoretis *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Fenomena resistensi dan keluhan dari aparatur serta masyarakat mengindikasikan rendahnya ekspektasi kinerja (*performance expectancy*) dan ekspektasi usaha (*effort expectancy*) terhadap sistem baru tersebut. Pengguna menganggap sistem digital ini belum memberikan dampak instan bagi kemudahan kerja mereka, melainkan justru menambah beban usaha karena rumitnya prosedur operasional standar (SOP) yang baru. Lebih lanjut, kurangnya pelatihan yang masif serta keterbatasan infrastruktur jaringan mencerminkan lemahnya dimensi kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*). Tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai dan pengaruh sosial (*social influence*) yang positif dari pimpinan, niat perilaku pengguna untuk bermigrasi dari sistem tradisional ke sistem digital akan tetap rendah. Pembahasan ini menegaskan bahwa transformasi tata kelola ekonomi publik tidak akan pernah mencapai titik optimal jika pemerintah hanya berfokus pada pengadaan perangkat keras dan regulasi normatif, tanpa menyentuh aspek kesiapan psikologis dan penguatan kapasitas literasi digital para penggunanya (Oktavia, 2025).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa "Transformasi Tata Kelola Ekonomi Publik menuju Good Governance" di instansi terkait telah berhasil membangun fondasi struktural yang kokoh melalui digitalisasi birokrasi. Implementasi berbagai platform digital terbukti efektif meningkatkan transparansi,

memotong rantai birokrasi yang koruptif, serta mempercepat akurasi pengelolaan keuangan publik guna meminimalisasi asimetri informasi. Namun, keberhasilan teknis ini belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan dimensi manusianya. Penelitian menemukan adanya hambatan kultural berupa resistensi terhadap perubahan (*resistance to change*), mentalitas silokan (*silo mentality*), serta rendahnya niat perilaku (*behavioral intention*) dari sebagian aparatur dan masyarakat yang disebabkan oleh minimnya literasi digital serta persepsi bahwa sistem baru ini rumit (*effort expectancy* yang tinggi).

Secara teoretis dan praktis, studi ini menegaskan bahwa reformasi ekonomi publik tidak dapat dicapai secara optimal jika hanya berfokus pada kecanggihan infrastruktur teknologi dan regulasi normatif semata. Keberlanjutan dari tata kelola yang baik (*good governance*) sangat bergantung pada keseimbangan antara kesiapan sistem dan adaptasi perilaku para pemangku kepentingan selaku pengguna akhir. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi ini memerlukan pendekatan yang integratif, di mana penguatan infrastruktur digital harus berjalan beriringan dengan intervensi psikososial, seperti pelatihan yang masif, penyederhanaan prosedur operasional digital, serta penciptaan kondisi fasilitas (*facilitating conditions*) yang merata. Hanya melalui integrasi antara sistem yang akuntabel dan kesiapan kapasitas manusia, tatanan ekonomi publik yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas dapat terwujud secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2017). Sound Governance , Dynamic Governance , Dan Open Government ( Comparative Concept Of Governance : Sound Governance , Dynamic Governance , And Open Government ). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance Di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 24–35. <https://doi.org/10.61142/Samakta.V1i2.127>
- Dahlia, N. (2023). Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bumdesa. *Journal Of Governance Innovation*, 5(1), 61–79.
- Frinaldi, A. (2023). Transformasi Sektor Publik Dalam Inovasi Pelayanan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 87–93.
- Kusuma, F. K. (2024). Birokrasi Berintegritas: Fondasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Bersih. *Open Journal Systems*, 18(1978), 1527–1536.
- Maharudin, D. (2025). Good Governance Dalam Pelayanan Publik : Systematic Literature Review Terhadap Model Dan Best Practices Di Berbagai Negara Good Governance In Public Service Delivery : A Systematic Literature Review Of Models And Best. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 13(3), 1–11.
- Mandasari, N. (2023). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah : Sound Governance , Dynamic Governance , Dan Open Government. *EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(1), 46–62.

- Muflihaniardi, B., Arisma, A. O., F, F. A. S., & Khusna, F. (2026). Transformasi Digital Dalam Birokrasi : Analisis Implementasi Identitas Kependudukan Digital ( IKD ) Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik ( Good Governance ) Di Kelurahan Airlangga , Kota Surabaya. *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 1641–1654.
- Oktavia, J. (2025). Transformasi Sosial Dan Tata Kelola Ekonomi Lokal Dalam Penataan Pasar Tradisional Aur Kuning Prespektif Maqashidus Syariah. *Baitul Maal*, 2(2), 205–217.
- Saepuloh, & Hilmi, F. (2026). MBG (Makan Bergizi Gratis) Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Analisis Model SPPG Dan Tantangan Tata Kelola Publik. *EKALAYA Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 1–9.
- Saputra, S. W., & Latief, M. (2025). Tantangan Dan Peluang Implementasi Restrukturisasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) Di Pemerintahan Daerah Luwu Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 10–13.
- Sartika, D., Nurhalisyah, E., Islam, M., & Deswara, M. I. (2025). Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia. *Journal Of Government Science Volume*, 1(2), 65–73.
- Silitonga, A. J. (2024). Transformasi Birokrasi Pemerintah : Pergeseran Paradigma Dari Era Klasik Ke Modern Dalam Penerapan Good Government Di Era Digital. *Journal Of Social, Justice And Policy*, 3(6), 13–17.
- Sodiq, B. A., Muhtadi, & Prayoga, S. (2026). Model Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Edunomika*, 10(1), 1–16.
- Sukawati, I. K., Putra, L., & Najicha, F. U. (2022). Tantangan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Berbasis Partisipasi Masyarakat. *JURNAL DISCRETIE: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 3(3), 170–181.
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia: Kajian Teoretis Atas Prinsip, Tantangan Dan Strategi Implementasi Hari. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.
- Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2024). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 145–152.
- Wahyiah, I. R. (2025). Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa : Upaya Menuju Smart Village Di Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja. *PANDITA: Interdisciplinary Journal Of Public Affairs*, 8(2), 832–849.
- Zalmi, H. Z., Anwar, C., & Yusuf, M. (2025). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ekonomi*, 2(2), 4561–4571.